

DIGITALISASI DAN DISPARITAS PENDIDIKAN DI SEKOLAH DASAR

Zaini Miftah¹, Fahru Rozi²

^{1,2} Universitas NU Sunan Giri Bojongoro

Pos-el : zmiftah0106@gmail.com¹

minladunka@yahoo.com²

Received 4 October 2022; Received in revised form 25 October 2022; Accepted 15 November 2022

Abstrak

Digitalisasi dalam dunia pendidikan pada hakikatnya merupakan ikhtiyar pemerintah untuk menyeragamkan akses pendidikan serta mengurangi masalah ketimpangan digital dalam dunia pendidikan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebijakan digitalisasi pendidikan yang diterapkan di SDN Ngayung dan sejauh mana kebijakan digitalisasi dapat membantu guru SDN meningkatkan akses pendidikan dan mengikuti digitalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Responden survei dalam penelitian ini adalah enam orang guru, kepala sekolah dan pengawas SDN. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Survei menemukan bahwa guru SDN di desa Ngayung merasakan langsung dua aspek dari kebijakan digitalisasi dalam pendidikan. Yang pertama adalah digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan dan yang kedua adalah digitalisasi pembelajaran. Pada dimensi pertama, guru mengalami akses yang lebih cepat terhadap kebijakan pendidikan. Guru dapat lebih memahami kebijakan pendidikan nasional dan mengikuti instruksi langsung dari pemerintah pusat melalui saluran informasi yang tersedia. Namun untuk aspek kedua, guru kurang siap dari segi konten walaupun mereka telah familiar dengan media, mereka tidak menggunakan berbagai produk software untuk memaksimalkan pembelajaran.

Kata kunci: *Digitalisasi, Disparitas Pendidikan, dan Ketimpangan Digital.*

Abstract

Digitalization in education is essentially a government effort to uniform access to education and reduce the problem of digital inequality in the world of education. The purpose of this article is to identify aspects of the education digitization policy implemented at SDN Ngayung and the extent to which the digitalization policy can help SDN teachers improve access to education and participate in digitalization. The method used in this research is qualitative with a case study approach. The survey respondents in this study were six teachers, school principals and SDN supervisors. Data was collected through in-depth interviews and documentation. The survey found that SDN teachers in Ngayung village felt firsthand two aspects of the digitalization policy in education. The first is the digitization of education policy communications and the second is the digitization of learning. In the first dimension, teachers experience faster access to education policies. Teachers can better understand national education policies and follow direct instructions from the central government through available information channels. But for the second aspect, teachers are not ready in terms of content even though they are familiar with the media, they do not use various software products to maximize learning.

Keywords: *Digitization, Education Disparity; and Digital Inequality.*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya adalah hak setiap anak di negara ini, tanpa terkecuali. Namun, disparitas pendidikan masih terjadi di Indonesia, terbukti dari berbagai data. Salah satu data yang menunjukkan perbedaan ini adalah distribusi populasi yang *melek* teknologi. Memang literasi merupakan indikator kuat efektifitas pendidikan formal di suatu tempat (Simbolon, Yatussa'ada, & Wanto, 2018). Banyaknya masyarakat yang belum memiliki keterampilan teknis mencerminkan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab ketimpangan pendidikan di Indonesia. Salah satu variabel penyebab adalah ketidaksesuaian antara pengeluaran pemerintah daerah dengan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan (Suratman, Soesatyo dan Soejoto, 2014). Variabel ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi setempat, terutama keadaan ekonomi masing-masing keluarga. Ketimpangan ekonomi ini berdampak langsung pada disparitas pendidikan. Secara lebih umum, Hidayat (2017) mengurai faktor-faktor yang menimbulkan ketimpangan seperti rendahnya kualitas sarana sekolah, rendahnya kualitas guru, faktor infrastruktur, jumlah dan kualitas buku (referensi), mahalnya biaya pendidikan, serta adanya pengelompokan sekolah berdasarkan standarisasi nasional maupun internasional.

Ketimpangan pendidikan di seluruh negeri juga sangat berkorelasi dengan kesenjangan informasi. Menurut data dari lembaga penelitian SMERU Indonesia, lebih dari 50% penduduk perkotaan memiliki akses internet pada tahun 2019. Angka ini lebih tinggi dari persentase pengguna internet di pedesaan sekitar 30%. Muhajir (2020) percaya bahwa situasi pandemi menunjukkan kesenjangan digital yang semakin besar di masyarakat. Ketimpangan ini pada akhirnya menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan. Dalam *e-learning*, siswa miskin dan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil seperti halnya desa Ngayung masih mengalami kesulitan mengakses pembelajaran karena kurangnya fasilitas TIK dan sulitnya mendapatkan sinyal internet.

Melihat kekurangan-kekurangan tersebut di atas, salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan ini adalah dengan menggalakkan kebijakan digitalisasi pendidikan. Secara bahasa, digitalisasi berarti proses penyediaan atau penggunaan sistem digital (BPPBI, 2016). Dengan pesatnya perkembangan teknologi, proses digitalisasi pun berlangsung. Revolusi Industri 4.0 dan Community Development 5.0 menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan, mengalami digitalisasi (Suryadi, Darmawan, Rahadian, Wahyudin & Riyana, 2022).

Dalam konteks pendidikan, digitalisasi dipahami sebagai upaya untuk mentransformasikan berbagai aspek dan proses pendidikan ke dalam format digital yang berbeda untuk mencapai tujuan pendidikan (Saputra, Kholil, Selegi, Setia, Sinaga, Farisi, 2021). Menurut Hasan, Harahap dan Inanna (2021), aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan pendidikan antara lain aspek administrasi dan kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi digitalisasi pendidikan pada kedua aspek tersebut.

Pada aspek pertama, salah satu bentuknya digitalisasi pendidikan yang dikomadani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan. Kemendikbud aktif mengkomunikasikan kebijakannya melalui media online yang lebih efisien dan hemat waktu (Hermawansyah, 2021). Menurut Suryana (2021), salah satu permasalahan pendidikan di Indonesia selama ini adalah komunikasi politik yang dinilai tidak efektif. Saluran komunikasi politik yang tidak efektif menyekat dan melanggengkan ketimpangan. Komunikasi yang efektif bahkan dikatakan sebagai salah satu pilar terpenting yang menopang pembangunan berkelanjutan (Ott, Wang, & Bortree, 2016).

Komunikasi kebijakan pendidikan merupakan elemen penting dari proses digitalisasi pendidikan. Dalam komunikasi kebijakan pendidikan perlu diperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap persiapan (*preparatory stage*), tahap meniru (*play stage*), dan tahap tindakan (*game stage*). Selain itu, sarana efektif yang dapat digunakan antara lain internet atau melalui sarana digital (Adima, 2021). Dari sudut pandang ini, penting untuk mendigitalkan pendidikan terkait dengan komunikasi tentang kebijakan digitalisasi.

Mengkomunikasikan kebijakan pendidikan dengan cara digital seperti ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya akan lebih efisien dan komunikasi dua arah bisa terjadi. Di sisi lain, justru dapat memperparah ketimpangan jika bagian tertentu dari guru masih belum memiliki akses terhadap informasi kebijakan yang disajikan secara online. Jika ini terjadi, ketimpangan akan melebar. Inilah yang dikhawatirkan oleh para ahli teori kesenjangan digital tentang mengambil pendekatan yang meresap. Menurut mereka, kesenjangan digital akan memperburuk ketimpangan yang ada di masyarakat (Fuady, 2019). Namun, kebijakan inklusif dipandang sebagai solusi dari masalah kesenjangan digital ini (Usman, 2021).

Selain aspek komunikasi pendidikan, aspek kinerja pendidikan menjadi bagian penting dari kebijakan digitalisasi pendidikan. Terkait

<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida>

dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menginisiasi sejumlah inovasi untuk mendukung proses digitalisasi tersebut. Salah satu hal terpenting adalah menciptakan Rumah Belajar. Rumah Belajar adalah portal pembelajaran yang menyediakan materi pembelajaran dan media komunikasi untuk memfasilitasi interaksi antar komunitas. Rumah Belajar hadir sebagai bentuk inovasi pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa dan guru dari berbagai jenjang pendidikan (Kemendikbud, 2011).

Kebijakan digitalisasi ini diterapkan secara nasional termasuk di Kabupaten Lamongan. Wilayah Ngayung tergolong daerah terpencil di wilayah Kabupaten Lamongan. Dari letak geografis desa ini, persoalan klasik terkait digitalisasi pendidikan kerap muncul di kalangan komponen pendidikan. Permasalahan digitalisasi pendidikan ini disebabkan masih banyaknya *white spot Internet* di wilayah Lamongan yaitu tidak ada sinyal internet atau sinyal sangat lemah karena lokasi tujuan. Dan satu diantaranya wilayah tersebut adalah desa Ngayung. Akses internet inilah yang menjadi faktor pembatas pembelajaran online di masa pasca pandemi Covid-19 terlebih di SDN Ngayung.

Rencana kerja pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2021 juga menguraikan isu-isu utama pendidikan di kabupaten tersebut. Masalah ini erat kaitannya dengan

belum maksimalnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Hal ini juga disebabkan oleh 1) rendahnya angka partisipasi; 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan untuk menjangkau semua anak usia sekolah,; dan 3) Anak usia sekolah tidak mendapatkan kesempatan dan fasilitas yang sama.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebijakan digitalisasi pendidikan yang berlaku pada SDN Ngayung dan 2) menganalisis bagaimana pemahaman kebijakan tersebut dapat membantu guru meningkatkan akses digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi/studi kasus. Menurut Creswell dan Poth (2016), metode studi kasus ini merupakan studi yang mengeksplorasi fenomena tertentu dalam periode waktu dan aktivitas (program, aktivitas, proses, organisasi atau kelompok) tertentu, sekaligus mengumpulkan informasi secara terperinci dan mendalam dengan menggunakan prosedur yang berbeda untuk mengumpulkan data selama periode waktu tertentu.

Dalam penelitian ini, program dan kegiatan yang dimaksud adalah proses digitalisasi pendidikan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April hingga September 2022 dengan



menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun aktivitas dalam analisis data melalui proses reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Adapun lokasi studi kasus ini adalah di SDN Ngayung, Kabupaten Lamongan. Alasan pemilihan lokasi ini karena wilayah Ngayung tergolong daerah terpencil. Secara geografis, desa Ngayung terletak di pedesaan yang jauh dari akses kota sehingga memunculkan persoalan klasik terkait proses digitalisasi pendidikan antara guru dan siswa.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah 6 guru. Sedangkan pemberi informasi pendukung adalah kepala sekolah dan juga pengawas SDN Ngayung. Hasil wawancara mereka menjadi sumber data utama untuk penelitian ini. Selain pengumpulan sumber primer, sumber data sekunder untuk penelitian ini berasal dari literatur, catatan wawancara, dan data tambahan lainnya seperti kuesioner digital yang dibagikan kepada guru. Data yang terkumpul kemudian di analisis secara induktif untuk mendapatkan gambaran berbagai hasil yang spesifik. Selama proses ini, ketiga komponen analisis berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan berulang-ulang hingga ditemukan gambaran lengkap dari model yang dicari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tujuan dari masalah penelitian adalah untuk mengidentifikasi aspek-aspek kebijakan digitalisasi pendidikan dan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut dapat membantu guru meningkatkan akses pendidikan dan mengatasi sejauh mana kesenjangan digitalisasi. Studi ini menunjukkan bahwa ada dua aspek digitalisasi pendidikan yang dirasakan guru, yaitu digitalisasi informasi kebijakan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran. Penyajian hasil dan pembahasan akan dibagi menurut dua aspek tersebut.

Digitalisasi Informasi Kebijakan Pendidikan

Aspek digitalisasi pendidikan yang paling dirasakan oleh responden adalah digitalisasi komunikasi pendidikan. Secara umum, para guru yang menyediakan sumber daya untuk penelitian ini menggunakan saluran informasi online yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagian besar dari mereka mendapatkan informasi langsung dari situs resmi dan saluran Youtube resmi. Yang lain mengambil informasi dari rekan-rekan mereka dan mencari tahu sendiri. Kolega yang memberikan informasi kemungkinan besar mendapatkan informasi serupa dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam komunikasi digital, guru di SDN Ngayung tidak jauh berbeda dengan guru di berbagai daerah, bahkan di negara berkembang yang mengalami adaptasi digital yang cepat pasca pandemi. Namun, percepatan adaptasi digital tentu dipengaruhi

oleh kematangan digital. Dari sisi pendidikan, menurut Pew Research Center, kesiapan digital diukur dari beberapa indikator yang juga dipakai oleh peneliti sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 1. Indikator Digitalisasi

No	Indikator	Alternatif Jawaban		
		S	Rg	Ts
1	Kepercayaan diri dalam menggunakan media computer	5	2	1
2	Penerapan teknologi baru	5	3	0
3	Menggunakan perangkat digital untuk pembelajaran	4	3	1
4	Keakraban dengan aspek teknis dan terminologi teknologi pendidikan kontemporer	6	2	0

S= Setuju Rg= Ragu-ragu Ts= Tidak Setuju

Dalam wawancara terkait respon guru terhadap kebijakan pemerintah dalam digitalisasi pendidikan yang dilakukan dengan pengawas, kepala sekolah, dan guru SDN Ngayung secara umum cukup kompeten dalam mencari informasi. Mereka tidak mengalami kesulitan dalam komponen komunikasi kebijakan pendidikan digital. Hasil wawancara dari instrument 1) kepercayaan diri dalam menggunakan media komputer; 2) penerapan teknologi baru; 3) menggunakan perangkat digital untuk pembelajaran; dan 4) keakraban dengan aspek teknis teknologi mendapatkan gambaran (63%) mereka menyatakan positif terhadap kebijakan digitalisasi, (31%) mereka menganggap biasa-biasa saja, dan (6%) mereka menganggap negatif.

Dalam lembar data yang mereka isi, tidak kurang dari 62%

menyatakan mampu menggunakan teknologi, 25% menyatakan ragu-ragu dan 13% orang menyatakan tidak mampu. Pada saat yang sama, dalam hal penggunaan Internet, tidak kurang dari 62% guru mengatakan mereka kompeten di bidang ini. Sebaliknya, 38% responden mengaku meragukan kemampuan berpikir kreatifnya. Demikian pula dalam keterlibatan digital, 75% responden menyatakan bahwa mereka telah akrab dengan kemampuan di bidang teknologi.

Persiapan digital ini akan sangat menentukan keberhasilan seseorang tumbuh di Indonesia dalam konteks digitalisasi pendidikan (Händel, Stephan, Gläser-Zikuda, Kopp, Bedenlier, & Ziegler, 2020).

Persiapan digitalisasi guru di SDN Ngayung juga berjalan dengan baik, meski masih perlu perbaikan. Semua informan melaporkan memiliki komputer atau perangkat lain seperti

<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida>

smartphone dan laptop yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Hanya dengan begitu mereka akan memiliki kepercayaan diri yang cukup dalam menggunakan komputer.

Dari hasil wawancara terkait percepatan adaptasi/kematangan digital diketahui bahwa mayoritas responden khususnya 8 orang tersebut, (62%) menyatakan memiliki kemampuan di bidang TIK untuk mengoperasikan teknologi, 3 orang (25%) menyatakan sangat baik, 2 orang menyatakan ragu-ragu (13%). Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka bersedia dan antusias untuk menggunakan teknologi terbaru, meskipun mereka masih terbatas dalam hal teknologi perangkat keras. Sedangkan untuk rekayasa perangkat lunak masih membutuhkan peningkatan keterampilan. Hal ini akan digali kembali dalam analisis aspek kedua dari digitalisasi pendidikan. Semua guru yang disurvei juga mengatakan bahwa mereka siap dan bersedia menggunakan alat dan keterampilan digital untuk tujuan pembelajaran. Namun komitmen mereka sudah ludes, ada juga yang masih ragu dan bahkan tidak menggunakannya. Namun, sebagian besar guru menggunakan alat dan keterampilan mereka untuk tujuan pembelajaran.

Terlepas dari sejauh mana perangkat digital digunakan untuk keperluan belajar-mengajar, dari sisi komunikasi politik, semua guru mengaku sangat terbantu dengan

model komunikasi yang dikembangkan Kemendikbud tersebut. Semua guru mengatakan bahwa mereka tahu dan menggunakan saluran ini untuk lebih memahami kebijakan terbaru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mayoritas guru juga mengaku mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kanal Youtube Kemendikbudristek berdiri pada 2011, namun di bawah Menteri Nadiem Makariem, kanal ini makin aktif. Banyak kebijakan pendidikan, khususnya Merdeka Belajar, disajikan secara serial, sistematis, dan interaktif melalui saluran ini, selain banyak webinar yang bermanfaat (Setijowati, Asih dan Witanto, 2021). Dari berita pendidikan dan pengumuman kebijakan terbaru melalui saluran digital, responden memiliki pengetahuan yang baik tentang produk layanan digitalisasi pendidikan pemerintah.

Digitalisasi Pembelajaran

Salah satu program digitalisasi pedagogis untuk mempercepat digitalisasi pembelajaran adalah "Rumah Belajar". Dalam versi resminya, Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan materi pembelajaran dan fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Rumah Belajar dianggap sebagai salah satu bentuk inovasi pembelajaran Industri 4.0 yang dapat digunakan oleh siswa dan guru mulai jenjang pendidikan PIAUD, TK, SD/MI,



SMP/MTs, maupun SMA/SMK (Kemendikbud, 2011). Fasilitas ini sudah ada sejak tahun 2011, namun situasi pandemi global telah meningkatkan relevansinya (Yanti, Kuntarto, & Kurniawan, 2020).

Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi kemudian membuat aplikasi versi mobile yang dapat diunduh dan dijalankan melalui perangkat Android (Julistian, 2019). Responden mengatakan mereka tahu tentang Rumah Belajar, namun mereka memiliki persepsi yang berbeda. Umumnya mereka mengetahui bahwa fasilitas ini dapat membantu pembelajaran online di Rumah Belajar. Namun, dalam tanggapan mereka terhadap Rumah Belajar, tampaknya guru yang menyediakan sumber daya telah menyadari bahwa bagaimanapun, fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara optimal, jika tidak memfasilitasi kemampuan membaca dan menulis digital; memasang Rumah Belajar sangat berguna, tetapi tidak dapat diakses oleh sekolah yang tidak memiliki akses Internet yang memadai.

Persepsi responden terhadap fasilitas Rumah Belajar sudah baik, namun belum dapat dimanfaatkan secara luas karena faktor internet masih menjadi permasalahan klasik dalam proses digitalisasi pendidikan di Indonesia. Selain jumlah pengguna internet yang terus meningkat, kecepatan akses internet di Indonesia termasuk yang terendah di dunia, bahkan di Asia Tenggara (Khidhir,

2019). Sementara di Indonesia, masih terdapat kesenjangan yang besar dalam kualitas layanan internet. Dalam studi pembangunan, akses yang tidak merata ke layanan digital, khususnya Internet, dikenal sebagai kesenjangan digital. Di Indonesia, kesenjangan digital masih tinggi antara pusat dan daerah (Ariyanti, 2016). Desa Ngayung merupakan daerah yang berada di daerah yang akses internetnya masih belum bagus. Hal ini erat kaitannya dengan daya jangkauan server, sehingga masih banyak tempat yang belum terjangkau jaringan internet di desa tersebut. Namun, ini sudah merupakan peningkatan yang signifikan. Dalam sebuah laporan survei dikatakan bahwa surat kabar dan internet adalah jenis media yang paling sedikit digunakan.

Namun, keberhasilan aspek kedua dari kebijakan digitalisasi pendidikan, yaitu digitalisasi pembelajaran dengan sarana digital, belum sejalan dengan yang pertama. Hal ini tercermin dari tanggapan para guru yang menjadi penyedia narasumber mengenai penggunaan digital pendidikan yang disediakan pemerintah. Responden hanya dapat memanfaatkan fasilitas dasar seperti akses internet, komputer dan proyektor. Media digitalisasi pedagogis yang mereka gunakan adalah internet, komputer, dan proyektor Liquid Crystal Display (LCD) yang muncul berulang kali dalam tanggapan pembicara. Faktanya, papan tulis dan proyektor

<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida>

LCD masih menjadi satu rumpun dalam pembelajaran yang berpusat pada guru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak fungsi papan tulis yang tidak dapat digantikan oleh layar LCD dan penggunaan papan tulis yang baik justru dapat mengoptimalkan hasil belajar siswa (Sutiarso, 2020). Siswa dapat lebih termotivasi untuk belajar jika guru menggunakan media proyeksi LCD (Sinaga, 2020). Namun, karena mereka jarang melihat proyektor LCD sebelumnya, keingintahuan dan motivasi mereka kemungkinan akan berkurang karena siswa terbiasa melihat proyektor.

Tidak ada responden yang mengatakan bahwa mereka dapat memanfaatkan fitur yang lebih spesifik seperti akun pendidikan gratis atau bahkan fitur. Beranda Pembelajaran yang sudah mereka kenal. Kepala sekolah dan pengawas mengkonfirmasi hal ini dalam pernyataan mereka selama proses wawancara. Baik pengawas maupun kepala sekolah mengatakan tidak

menemukan guru yang benar-benar menggunakan fasilitas yang sifatnya lebih esensial, terutama untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Menggunakan proyektor LCD dan mencari informasi di Internet belum dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pembelajaran terhubung yang menjadi ciri pembelajaran di era digital (Duke, Harper, & Johnston, 2013).

Di sisi lain, seperti Rumah Belajar dapat disebut sebagai bentuk teknologi pendidikan yang menggunakan prinsip asosiasi karena kesamaan prinsipnya dengan kursus online terbuka besar. Untuk kesiapan digital dan literasi digital, kesiapan digital guru SDN Ngayung yang menanggapi penelitian ini menunjukkan kemahiran mereka dalam menggunakan literasi digital, menggunakan komputer dan internet. Hal ini sebagai gambaran tentang pemahaman kebijakan pemerintah dalam membantu guru untuk meningkatkan akses digital.

Tabel 2. Digitalisasi Pembelajaran

No	Indikator	Alternatif Jawaban		
		S	Rg	Ts
1	Percepatan adaptasi/kematangan digital	2	1	5
2	Ketersediaan dan Pemanfaatan fasilitas digital	1	1	6
3	Digitalisasi untuk mengatasi ketimpangan dalam pendidikan	1	1	6
4	Tidak adanya kesenjangan dalam akses teknologi	1	2	5

S= Setuju Rg= Ragu-ragu Ts= Tidak Setuju

Dalam lembar data yang mereka isi, secara keseluruhan menggambarkan pemahaman kebijakan pemerintah dapat membantu guru dalam meningkatkan



akses digital menyatakan 69% menyatakan yakin akan adanya ketimpangan, 16% menyatakan ragu-ragu, dan 15% meyakini akan adanya keadilan dalam pelayanan akses pendidikan. Secara lebih rinci dinyatakan 63% menyatakan tidak yakin akan adanya percepatan dalam digitalisasi, sedang 25% menyatakan ragu-ragu, dan 12 % orang menyatakan yakin akan adanya percepatan. Pada saat yang sama, dalam hal ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas digital dan Digitalisasi untuk mengatasi ketimpangan dalam pendidikan memiliki proporsi yang sama, yaitu 75% guru mengatakan mereka tidak yakin di bidang ini. Sebaliknya, 13% responden mengaku meragukan dan 12% mereka yakin akan terlaksana. Sedangkan terkait dengan kesenjangan akses teknologi, responden menyatakan 63% yakin adanya kesenjangan, 25% meragukan, dan 12% meyakini tidak ada kesenjangan.

Permasalahan yang dihadapi guru SDN Ngayung dalam konteks digitalisasi pendidikan merupakan permasalahan yang umum jika dilihat dari perspektif holistik. Menurut Marakovits (2021), ada empat masalah utama dalam upaya digitalisasi pendidikan di abad 21. Yang pertama meliputi tantangan teknologi yang dihadapi di tingkat keluarga, antara lain kurangnya perangkat yang andal, keandalan, dan internet *broadband*. Kendala kedua menyangkut kurangnya ketersediaan

pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan guru untuk menerapkan perangkat digital dan teknologi pembelajaran. Hambatan ketiga adalah transisi dari pengajaran dan pembelajaran yang berpusat pada guru ke pengajaran yang berpusat pada siswa. Hambatan keempat adalah melatih orang tua dan keluarga untuk mengenal teknologi dan perangkat digital yang digunakan anak-anak mereka. Hal inilah yang belum dilaksanakan oleh pemerintah di wilayah desa Ngayung, sehingga mereka meragukan bahkan tidak percaya akan kebijakan digitalisasi dalam pembelajaran di SDN Ngayung.

Guru yang diwawancarai termasuk mereka yang mengalami hambatan di atas yang membuat sulit untuk menggunakan fasilitas pendidikan digital yang disediakan pemerintah, meskipun mereka menyadarinya. Hambatan tersebut terutama terkait dengan kualitas internet yang buruk, seperti yang disebutkan oleh kepala SDN Ngayung. Kendala lainnya adalah kurangnya kreativitas dan keterampilan teknis untuk dapat menggunakan perangkat lunak atau situs *e-learning* seperti Rumah Belajar atau Canva, meskipun mereka telah menguasai dasar-dasar penggunaan *e-learning*, menggunakan komputer dan internet, seperti mencari informasi dan membuat presentasi.

Responden mengakui bahwa kebijakan pemerintah dalam mendigitalkan pendidikan ditujukan untuk mengatasi ketimpangan dalam

<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida>

pendidikan. Namun, mereka memiliki persepsi yang berbeda tentang efektivitas kebijakan ini. Sebagian besar guru setuju bahwa digitalisasi telah mengurangi ketimpangan. Seperti yang dikatakan salah satu guru, "Kebijakan digitalisasi dapat mengurangi ketimpangan nasional karena dengan digitalisasi, anak-anak yang tinggal di pelosok pun dapat menemukan informasi dengan cepat. Begitu pula dengan guru lain yang mengatakan kebijakan digitalisasi memudahkan guru dan siswa mendapatkan informasi yang *up to date*. Guru lain menambahkan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan sangat membantu dalam perluasan materi.

Namun, salah satu guru menjelaskan prasyarat keberhasilan kebijakan digitalisasi pendidikan ini. Dalam wawancaranya, ia mengatakan: "Upaya digitalisasi dapat mengurangi ketimpangan pendidikan nasional melalui fitur-fitur yang tersedia di portal pendidikan yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Namun, menurut salah satu guru tersebut, hal ini mungkin tidak dirasakan oleh guru dan siswa di daerah terpencil yang tidak memiliki akses internet. Menurutnya, internet merupakan premis utama keberhasilan digitalisasi pendidikan. Seperti yang dijelaskan Arta (2021), dengan adanya internet semuanya dapat diakses secara langsung dan mudah. Tanpa internet yang memadai, pembelajaran online bagi siswa dan

guru di pedesaan seperti Kabupaten Lamongan menjadi sulit.

Dari tanggapan tersebut, dapat dilihat bahwa guru yang menegaskan efektivitas instruksi digitalisasi untuk memecah ketimpangan berbicara dalam kerangka pengumpulan informasi. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sangat terbantu oleh aspek digital dari komunikasi kebijakan. Namun, responden yang percaya bahwa digitalisasi tidak dapat mematahkan ketimpangan berbicara dalam konteks guru menggunakan media digital dalam pengajaran mereka. Selain itu, persoalan pemerataan infrastruktur pendukung juga dinilai menjadi persoalan tersendiri. Akses internet yang tidak merata telah memperparah kebijakan digitalisasi. Salah satu responden menjawab, bahwa upaya digitalisasi justru meningkatkan ketimpangan pendidikan nasional karena beberapa segmen masyarakat tidak memiliki akses ke sana dan lokasi geografis sekolah tidak terjangkau oleh Internet.

Pendapat responden sependapat dengan pendapat kepala sekolah yang menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi tidak mengurangi ketimpangan tetapi berisiko meningkatkan ketimpangan karena pembelajaran kini berbasis teknologi. Persepsi responden ini menegaskan bahwa aspek digitalisasi yang paling menguntungkan adalah digitalisasi komunikasi politik dan akses informasi. Di sisi lain, responden tersebut belum mampu



memanfaatkan layanan digital dalam aspek digitalisasi pembelajaran. Ketidakmampuan ini bahkan menimbulkan kekhawatiran akan memperparah masalah ketimpangan pendidikan.

Kendala Terbesar

Pasca pandemi Covid-19 memperlihatkan bagaimana respons negara dalam menghadapi krisis; di Indonesia tampaknya kita masih cukup tergepoh-gepoh. Pada awal penerapannya, pembelajaran daring mengalami sejumlah kendala. Pandemi dan proses pembelajaran dari rumah berdampak pada kurang lebih 45,3 juta pelajar SD-SMA dan 8 juta mahasiswa (Kemenristekdikti, 2018).

Beberapa riset telah dikemukakan bahwa kendala terbesar pembelajaran *daring* yang dialami oleh peserta didik yakni kesenjangan digital (*digital divide*). Kesenjangan digital didefinisikan OECD sebagai kesenjangan antara individu, bisnis, maupun rumah tangga dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan penggunaan internet.

Kesenjangan akses menjadi sorotan utama dalam proses pembelajaran *daring* selama pandemi. Masalahnya tidak hanya pada infrastruktur yang belum merata, namun juga kepemilikan perangkat TIK dalam rumah tangga. Meski pembelajaran *daring* sudah lama digadang akan menjadi solusi pendidikan, pada 2019 dalam laporan Network Readiness Index (NRI)

Indonesia masih pada peringkat 76 dari 121 negara. Kelemahan terbesar ada pada partisipasi digital, jaringan internet, dan kebijakan terkait TIK.

Bukan rahasia bahwa infrastruktur internet di Indonesia saat ini masih terfokus di Pulau Jawa dan wilayah perkotaan. Penetrasi penggunaan internet di Indonesia di wilayah perkotaan sebesar 71-72%, namun di desa masih di kisaran 42-48%. Lebih lanjut, kesenjangan akses di Indonesia dapat dilihat pada kemampuan rumah tangga dalam kepemilikan perangkat TIK. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2018, hanya 20,05% rumah tangga di wilayah urban yang memiliki komputer.

Data lain dari *Save the Children* (2020) menyebutkan bahwa penggunaan kanal pembelajaran *daring* bagi peserta didik hanya sebesar 10%, sebanyak 70% masih menggunakan televisi untuk mendapatkan materi pembelajaran. Sedangkan untuk pendidik sebesar 25% yang menggunakan kanal pembelajaran *daring*. Tingkat partisipasi belajar ini tentu sangat rendah dan tidak sesuai dengan ekspektasi dari strategi pembelajaran daring yang dicanangkan pemerintah pada awal pandemi.

Kesenjangan sosial-ekonomi dari peserta didik memperlebar jurang ketimpangan antar peserta didik. Jawabannya dapat diketahui, peserta didik yang memiliki akses dan keterampilan tentu lebih diuntungkan dengan kondisi ini. Riset yang

<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida>

dilakukan oleh INOVASI (2020), peserta didik dengan latar pendidikan orang tua SMA dan S1 memiliki akses lebih besar dalam menggunakan media belajar *daring*. Sedangkan

KESIMPULAN DAN SARAN

Aspek digitalisasi pendidikan Kemendikbud yang dirasakan oleh guru di SDN Ngayung adalah digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran dalam bentuk Rumah Belajar. Namun, dalam hal digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan, guru merasa memiliki akses yang lebih cepat terhadap kebijakan pendidikan. Guru dapat lebih memahami kebijakan pendidikan nasional dan dapat mengikuti arahan langsung pemerintah pusat melalui saluran informasi yang tersedia.

Sedang dalam hal digitalisasi pembelajaran, ternyata guru belum menunjukkan kesiapan digital secara penuh. Mereka tidak memanfaatkan berbagai *software* yang ditawarkan untuk memaksimalkan pembelajaran, meskipun mereka sudah familiar dengan media digital tersebut, hal ini dikarenakan masih banyaknya *white spot Internet* di wilayah Lamongan yaitu tidak ada sinyal internet atau sinyal sangat lemah karena lokasi tujuan.

Upaya pemerataan digital harus mendahului upaya digitalisasi pendidikan. Studi kasus ini menunjukkan bahwa guru di daerah tertinggal telah berhasil mengikuti kondisi akses informasi

peserta didik dengan orang tua berpendidikan akhir SD paling sedikit mengumpulkan tugas melalui media belajar *daring*.

perkembangan terbaru dalam kebijakan pendidikan. Namun, bukan berarti mereka benar-benar memanfaatkan semua kemudahan yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang memadai agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam upaya digitalisasi pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adima, M.Z.F. (2021). Sosialisasi kebijakan pendidikan. *MUNTAZAM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 42-53.
- Ariyanti, S. (2016). *Studi pengukuran digital divide di Indonesia*. Buletin Pos dan Telekomunikasi, 11(4), 281-92.
- Arta, I.G.A.J. (2021). Digitalisasi pendidikan: Dilematisasi dan dehumanisasi dalam pembelajaran daring perspektif filsafat Paulo Friere. Pp. 96-107 in *Prosiding Seminar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*.
- BPPBI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nilai>.
- Creswell, J.W. & Cheryl, N.P. (2016). *Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches*. Sage publications.



<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida>

- Duke, B., Harper, G., & Johnston, M. (2013). Connectivism as a digital age learning theory. *The International HETL Review*, (Special Issue), 4–13.
- Esti, A.D. (2012). *Warga Bicara Media: Sepuluh Cerita Cerita*. Jakarta: CIPG.
- Fuady, A.H. (2019). *Teknologi digital dan ketimpangan ekonomi di Indonesia*. *Masyarakat Indonesia*, 44(1), 75–88.
- Goldie, J.G.S. (2016). *Connectivism: A knowledge learning theory for the digital age?*. *Medical Teacher*, 38(10), 1064–1069.
- Händel, M., Stephan, M., Gläser-Zikuda, M., Kopp, B., Bedenlier, S., & Ziegler, A (2020) Digital readiness and its effects on higher education students' socio-emotional perceptions in the context of the COVID-19 pandemic, *Journal of Research on Technology in Education*, 54(2), 267-280. DOI: 10.1080/15391523.2020.1846147
- Hasan, M., Harahap, T.K. & Inanna. (2021). *Landasan Pendidikan*. Penerbit Tahta Media Group.
- Hermawansyah. (2021). Manajemen lembaga pendidikan sekolah berbasis digitalisasi di era Covid-19. *Fitrah: Jurnal Studi Pendidikan*, 12(1), 27–46.
- Hidayat, A. (2017). Kesenjangan sosial terhadap pendidikan sebagai pengaruh era globalisasi, *Justisi Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 15-25.
- Julistian, U. (2019). *Fasilitas E-Learning, Kemendikbud Luncurkan Rumah Belajar*. Gatra Online. 16 January 2022. <https://www.gatra.com/news-456801-teknologi-fasilitas-e-learning-kemendikbud-luncurkan-rumah-belajar.html>.
- Kemendikbud. (2011). *Apa itu portal Rumah Belajar?* Portal Rumah Belajar Kemendikbud. 15 January 2011. <https://belajar.kemdikbud.go.id/>.
- Khidhir, S. (2019). *Indonesia is too slow!* The ASEAN Post. 16 January 2022, <https://theaseanpost.com/article/indonesia-too-slow>.
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Muhajir, M.A. (2020). Pembelajaran daring di era covid-19: Kesenjangan digital, sistem kompetisi, dan model pendidikan yang manusiawi. *MIMIKRI: Jurnal Agama dan Kebudayaan*, 6(2), 220-234.
- Ott, H., Wang, R., & Bortree, B. (2016). Communicating sustainability online: An examination of corporate, nonprofit, and university websites. *Mass Communication and Society*, 19(5), 671–87.
- Saputra, D.N., Kholil, A., Selegi, S.F., Setia, A., Sinaga, K., & Farisi, A. (2021). *Landasan Pendidikan*. Media Sains Indonesia.

<https://journal.stitaf.ac.id/index.php/ibtida>

- Setijowati, U., Marjuni, Asih, S.S. & Witanto, Y. (2021). *Pemberdayaan guru dan orang tua peserta didik dalam pembelajaran berbasis online*. Pp. 224–31 in Standarisasi Pendidikan Sekolah Dasar Menuju Era Human Society 5.0. Cirebon: FKIP Universitas Muhammadiyah Cirebon.
- Sinaga, I., Chan, F., & Sofwan, M. (2020). Pemanfaatan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Guru Sekolah Dasar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 271-279. doi.org/10.33487/edumaspul.v4i1.344
- Suratman, B., Soesatyo, Y., & Soejoto, A. (2014). Analisis faktor yang memengaruhi ketimpangan pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 20(2), 176-182.
- Suryadi, A., Darmawan, D., Rahadian, D., Wahyudin, D., & Riyana, C. (2022). Pengembangan aplikasi sistem database Virtual Community Digital Learning Nusantara (VCDLN) menggunakan model waterfall dan pemrograman terstruktur. *Jurnal PETIK*, 8(1), 48-56.
- Suryana, C. (2021). *Komunikasi kebijakan pendidikan*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sutiarso, S. (2020). Optimalisasi penggunaan papan tulis dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Seminar Nasional Pendidikan FKIP Unila 2020, Tema: Pembelajaran Abad 21: Mencapai Kompetensi Pendidikan Generasi Emas 2045, 1–5.
- Usman, S. (2021). *Inklusi sosial di era digital (social inclusion in the digital age)*. Academic Essay: Diigtal Society. 16 January 2021. <https://pssat.ugm.ac.id/inklusi-sosial-di-era-digital-social-inclusion-in-the-digital-age/>.
- Yanti, M.T., Kuntarto, E., & Kurniawan, A.R. (2020). Pemanfaatan portal Rumah Belajar Kemendikbud sebagai model pembelajaran daring di sekolah dasar. *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar*, 5(1), 61–68. Top of Form

